UNIVERSITAS
GADJAH MADA
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PROSEDUR PENCABUTAN PENETAPAN (APPROVAL) FASILITAS KESEHATAN TEMPAT MEDICAL CHECK-UP PELAUT DI INDONESIA OLEH BALAI KESEHATAN KERJA PELAYARAN
WAGNER TULUS, Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., Ph. D
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Ali, Zaenuddin, 2017, *Hukum Islam*, Sinar Grafika, Bandung.

Bevir, Mark, 2013, *A Theory of Governance*, University of California Press Ltd, London.

International Labour Organization, 2006, *International Labour Conference, The ILO Maritime Labour Convention 2006*, ILO Publishing, Geneva.

International Maritime Organization, 2011, *International Convention On Standards Of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, STCW Including 2010 Manila Amandments*, IMO Publishing, London.

Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 1996, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rahardjo, Satjipto, 1981, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PROSEDUR PENCABUTAN PENETAPAN (APPROVAL) FASILITAS KESEHATAN TEMPAT MEDICAL CHECK-UP PELAUT DI INDONESIA OLEH BALAI KESEHATAN KERJA PELAYARAN
WAGNER TULUS, Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., Ph. D
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Sudjana, Nana dan Ibrahim, 2007, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Sinar Baru Algensindo, Bandung.

Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* Alfabeta, Bandung.

Sumardjono, Maria SW, 2019, *Bahan Kuliah, Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, edisi revisi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

2. Artikel Majalah atau Koran

Halidi, Risna, "ILO: Indonesia Pencetak Lulusan Pelaut Terbanyak di Dunia", *https://www.suara.com/lifestyle/2020/07/30/153000/ilo-indonesia-pencetak-lulusan-pelaut-terbanyak-di-dunia?page=all*, diakses 20 Januari 2021.

Helmi, "KPLP Diakui Dan Banyak Berperan Dalam Kegiatan International IMO", *https://bisnisnews.id/detail/berita/kplp-diakui-dan-banyak-berperan-dalam- kegiatan--international-imo*, diakses 28 Januari 2021.

Noviani, Anna, "Laporan Dari London: Indonesia Resmi Jadi Anggota Dewan IMO 2020-2021", *https://ekonomi.bisnis.com/read/20191130/98/1175974/laporan-dari-london-indonesia-resmi-jadi-anggota-dewan-imo-2020-2021,* diakses 27 Januari 2021.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PROSEDUR PENCABUTAN PENETAPAN (APPROVAL) FASILITAS KESEHATAN TEMPAT MEDICAL CHECK-UP PELAUT DI INDONESIA OLEH BALAI KESEHATAN KERJA PELAYARAN
WAGNER TULUS, Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., Ph. D
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

3. Internet

_____, "Indonesia Penyuplai Pelaut Terbanyak Ketiga di Dunia, Gajinya Sampai Rp 21 Juta", *https://kumparan.com/kumparanbisnis/indonesia-penyuplai-pelaut- terbanyak-ketiga-di-dunia-gajinya-sampai-rp-21-juta-1vC8SHX5FID/full*, diakses 20 Januari 2021.

_____, "Konvensi STCW", *https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_STCW? veaction=edit&section=3*, diakses 3 Januari 2021.

_____, "Maritime Labour Convention, 2006 as amended", *http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_553490.pdf* , diakses 13 Januari 2021.

_____, "Organisasi Maritim Internasional", *https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Maritim_Internasional,* diakses 13 Januari 2021.

_____, "Pengumuman Penunjukan Rumah Sakit/Klinik Utama Sebagai Tempat Pengujian Kesehatan Pelaut", *https://bkkp.dephub.go.id/index.php/news/read/pengumuman-penunjukan-rumah-sakitklinik-utama-sebagai-tempat-pengujian-kesehatan-pelaut-09-2020,* diakses 9 Februari 2021.

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PROSEDUR PENCABUTAN PENETAPAN (APPROVAL) FASILITAS KESEHATAN TEMPAT MEDICAL
CHECK-UP PELAUT DI INDONESIA OLEH BALAI KESEHATAN KERJA PELAYARAN
WAGNER TULUS, Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., Ph. D
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

_____, "Pengumuman Penunjukan Rumah Sakit/Klinik Utama Sebagai Tempat Pengujian Kesehatan Pelaut", *https://bkkp.dephub.go.id/index.php/news/read/pengumuman-penunjukan-rumah-sakitklinik-utama-sebagai-tempat-pengujian-kesehatan-pelaut-2020*, diakses 9 Februari 2021.

_____, "Posisi Geografis Indonesia dalam Peta Dunia", *https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/posisi-geografis-indonesia*, diakses 9 Februari 2021.

_____, "SISKESPI", *https://bkkp.dephub.go.id/index.php/article/siskespi.html*, diakses 9 Februari 2021.

4. Tesis

Andanasari, Rizka, 2017, *Peran Balai Kesehatan Kerja Pelayaran Dalam Menunjang Keselamatan Pelayaran Melalui Sertifikasi Kesehatan Tenaga Kerja Pelayaran (Pelaut)*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Putri, Melyarna, 2016, *Perencanaan Strategi Pengembangan Usaha Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKKP) Dengan Analisis Balance Score Card*,

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PROSEDUR PENCABUTAN PENETAPAN (APPROVAL) FASILITAS KESEHATAN TEMPAT MEDICAL
CHECK-UP PELAUT DI INDONESIA OLEH BALAI KESEHATAN KERJA PELAYARAN
WAGNER TULUS, Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., Ph. D
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Tesis, Program Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Setiawan, Sonny, 2014, *Sertifikasi Kesehatan Pelaut dan Monitoring dalam Menciptakan Keselamatan Pelayaran (Studi pada Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKKP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Provinsi DKI Jakarta)*, Tesis, Program Magister Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.

5. Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Maritime Labour Convention (MLC) 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5931).

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembar Negara Nomor 5601).

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembar Negara Nomor 5063).

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PROSEDUR PENCABUTAN PENETAPAN (APPROVAL) FASILITAS KESEHATAN TEMPAT MEDICAL
CHECK-UP PELAUT DI INDONESIA OLEH BALAI KESEHATAN KERJA PELAYARAN
WAGNER TULUS, Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., Ph. D
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849).

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1962 Tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2373)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Pelaut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 389).

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Pelaut, Tenaga Penunjang Keselamatan Pelayaran, Dan Lingkungan Kerja Pelayaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 602).

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PROSEDUR PENCABUTAN PENETAPAN (APPROVAL) FASILITAS KESEHATAN TEMPAT MEDICAL CHECK-UP PELAUT DI INDONESIA OLEH BALAI KESEHATAN KERJA PELAYARAN
WAGNER TULUS, Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., Ph. D
Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan, Sertifikasi Serta Dinas Jaga Pelaut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1089).

Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kesehatan Kerja Pelayaran.

Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2008 tentang Dokumen Identitas Pelaut.

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/2/7/DJPL-2016 Tentang Pengawasan Dokumen Kepelautan.